

Nomor : B/ 903 /AA.05/2022  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun  
2022

6 Desember 2022

Yth. Sekretaris Daerah Kota Dumai  
di  
Dumai

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 pada Pemerintah Kota Dumai, dengan uraian sebagai berikut:

## 1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Dumai. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## 2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Pemerintah Kota Dumai telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dengan sasaran strategis dan indikator sasaran yang sebagian besar sudah berorientasi hasil (*outcome*);
- b. Menyusun *logical framework* dalam bentuk *Cascading* kinerja pada level Pemerintah Daerah dan sebagian Perangkat Daerah;
- c. Melakukan evaluasi internal implementasi SAKIP terhadap seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Dumai.

## 3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Dumai menunjukkan bahwa nilai sebesar **64,20** dengan predikat **“B”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“baik”**, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,71
2.	Pengukuran Kinerja	30	15,38
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,16
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,95
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>64,20</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>

Hasil evaluasi tahun 2022 **“tidak diperbandingkan”** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level organisasi perangkat daerah.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Dumai tahun 2022 sebagai berikut:

### 1) **Perencanaan kinerja**

Pemerintah Kota Dumai telah menyusun dokumen perencanaan kinerja mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Pemerintah Kota Dumai juga telah melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan sebagian Perangkat Daerah untuk memastikan keselarasan target kinerja yang ingin dicapai. Selanjutnya, telah disusun penjenjangan kinerja baik pada tingkat Pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Belum disusunnya pedoman teknis perencanaan kinerja sebagai acuan dalam pelaksanaan manajemen kinerja;
- Masih terdapat ketidaksielarasan antara Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis terkait indikator kinerja dan target yang ditetapkan pada sebagian Perangkat Daerah sebagai contoh pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur/*measurable*, relevan dan cukup. Sebagai contoh indikator kinerja yang dimiliki Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana dalam mendukung sasaran “Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan program Keluarga Berencana”;
- Pemerintah Kota Dumai dan sebagian besar Perangkat Daerah telah menyusun dokumen penjenjangan kinerja (*cascade down*), namun belum memiliki kualitas yang cukup baik dan belum berdasarkan *logical framework*. Hal ini ditunjukkan dengan kinerja di level pimpinan perangkat daerah yang merupakan kumpulan kinerja di bawahnya seperti pada Dinas Tenaga Kerja.

### 2) **Pengukuran Kinerja**

Pemerintah Kota Dumai dan unit kerjanya telah melakukan pengukuran realisasi kinerja dan rencana aksinya secara berkala setiap triwulan. Data kinerja yang dikumpulkan sebagian besar telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. Selain itu, telah dilakukan perumusan indikator kinerja secara terukur pada setiap jenjang hingga ke level pegawai.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Belum disusunnya pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja, yang digunakan di level Pemda maupun pada unit kerja;
- Telah memiliki dokumen Indikator Kinerja Utama, namun masih terdapat indikator yang belum memiliki formulasi perhitungan untuk menjelaskan cara mengukur keberhasilan indikator tersebut yang salah satunya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Pelaksanaan pengukuran kinerja secara belum memanfaatkan aplikasi *monitoring* dan evaluasi untuk mempermudah pimpinan dalam memantau progres capaian kinerja pemda maupun Perangkat Daerah.

### 3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kota Dumai telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 baik tingkat Pemda maupun tingkat Perangkat Daerah. Laporan kinerja tersebut telah dilaporkan secara tepat waktu disertai dengan analisis capaian kinerja yang mendalam pada tingkat Pemerintah Daerah.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Laporan kinerja belum dipublikasikan secara umum melalui *website* resmi oleh Pemerintah Kota Dumai;
- Sebagian besar Laporan Kinerja pada level Perangkat Daerah belum cukup menyampaikan informasi yang memadai, sebagai contoh pada laporan Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian belum sepenuhnya menjelaskan faktor keberhasilan atau hambatan dalam mencapai sasaran strategis;
- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup, seperti pada Laporan Kinerja Dinas Kesehatan.

### 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Pemerintah Kota Dumai telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh Perangkat Daerah.

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- Belum memiliki pedoman evaluasi untuk mendukung pelaksanaan implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Dumai;
- Sebagian besar perangkat daerah belum menindaklanjuti hasil evaluasinya;

- Laporan hasil evaluasi yang dilakukan belum memberikan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap Perangkat Daerah.

#### 4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan, agar tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah berorientasi pada hasil dan memastikan kecukupannya dalam mengukur keberhasilan tujuan/sasaran strategis tersebut.
- Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan pada Perangkat Daerah untuk memastikan keselarasan dan kesesuaiannya, khususnya antara Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama;
- Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan/*cascading* kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memerhatikan *logical framework* dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan/*cascading* kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
- Menyusun Kebijakan/SOP terkait Perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pelaporan data kinerja di Pemerintah Kota Dumai;
- Membangun aplikasi *monitoring* dan evaluasi capaian kinerja untuk mempermudah dan mengefektifkan proses pemantauan progres capaian kinerja level Pemda maupun Perangkat Daerah;
- Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala atas kinerja dan realisasi di tingkat Perangkat Daerah beserta rencana aksinya, sehingga dapat diketahui tingkat ketercapaian dan efektivitas strategi yang digunakan;
- Memastikan Laporan Kinerja dipublikasikan melalui *website* resmi Pemerintah Kota Dumai;
- Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja terutama di level Perangkat Daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, yang memuat analisis terkait pencapaian kinerja serta menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya;
- Menyusun pedoman evaluasi AKIP yang disesuaikan dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021;
- Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**



*Erwan Agus Purwanto*

**Erwan Agus Purwanto**

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Riau;
4. Wali Kota Dumai.